



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 November 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 16.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Penyampaian Renstra dan program kerja Pemerintah 5 tahun kedepan; 2. Evaluasi pelaksanaan anggaran K/L TA 2019; 3. Membahas Program Legislasi Nasional.
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: 41 dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi hari ini untuk membahas Penyampaian Renstra dan program kerja Pemerintah 5 tahun kedepan, Evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi TA 2019 dan Membahas program Legislasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi Tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempertajam program kerja tahunan di masing-masing sektor, terutama pada program prioritas sesuai dengan saran dan usulan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program dan anggaran TA 2015-2019 pada beberapa program dibidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya terhadap capaian realisasi kinerja yang belum memenuhi target, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menjadikannya bahan evaluasi dan masukan pada program kerja tahun 2020-2024.
3. Terhadap serapan anggaran dalam APBN TA 2019 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yaitu:

Kementerian/Lembaga	Realisasi Keuangan <i>pertanggal 19 November 2019</i>	Realisasi Fisik <i>pertanggal 19 November 2019</i>
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	76,13 %	80,13 %

Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 hingga diatas 90%.

4. Komisi V DPR RI dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi menetapkan anggaran APBN TA 2019 disepakati anggaran sebesar Rp.4,325T, namun pada pemaparan realisasi menjadi Rp.5,278T, untuk itu Komisi V DPR RI meminta penjelasan tertulis dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi terhadap tambahan anggaran tersebut dan akan diagendakan pada rapat berikutnya.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk mengevaluasi tenaga pendamping desa serta mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendamping desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan, dalam rangka peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa.
6. Komisi V DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mendorong Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Prolegnas 2019-2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 19 November 2019

MENTERI DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,


ABDUL HALIM ISKANDAR

KETUA RAPAT,


IR. RIDWAN BAE